EQuator
Jumat, 6 Juli 2012

Masalah Teknis, Gubernur Tak Perlu Gubris

Pontianak. Kendati kembali menyandang predikat WDP, diakui BPK secara umum laporan keuangan APBD Kalbar mengalami banyak kemajuan.

Tercatat surplus dari Rp78,7 miliar naik menjadi Rp206,9 miliar. Namun, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2010 yang Rp231 miliar naik Rp111 miliar menjadi Rp342 miliar pada 2011. Dengan demikian masih banyak dana yang tidak terserap oleh pembangunan.

"Untuk Silpa itu jika ingin digunakan harus dibicarakan bersama Dewan untuk menghindari terjadinya kesalahan."

■ Halaman 7

Masalah Aset Pemprov Kalbar:

- Aset tetap tanah sebesar Rp 92,2 miliar
- Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 2,8 miliar
- Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 380,9 miliar
- Aset tetap lainnya sebesar Rp 5,2 milyar
- Aset tetap tanah belum bersertifikat
- Aset tanah bersertifikat tidak a/n Pemprov Kalbar minimal seluas 87.302.153,26 m2 senilai Rp 53,2 miliar
- Aset tetap yang dikuasai pihak ketiga senilai Rp1,7 miliar
- Aset tetap yang digunakan pihak lain tanpa izin senilai Rp 908 juta.

Catatat : Sistem pencatatan, pelaporan dan pengamanan aset tetap pada Pemprov Kalbar belum memadai.

Sumber : BPK RI Perwakilan

Masalah Teknis

.....dari halaman 1

saran Anggota VI BPK RI Rizal Djalil usai menyampaikan LHP di Gedung DPRD Kalbar, kemarin.

Yang menggembirakan, lanjut Rizal, LHP 2011 tingkat investasi naik Rp0,43 triliun menjadi Rp2,9 triliun. Meski sudah terjadi perubahan yang signifikan, lanjut Rizal, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya sudah disampaikan beberapa waktu lalu.

Persoalan aset, diakui Rizal masih menjadi kendala utama dan paling menonjol adalah aset tetap dan berjalan dan jaringan irigasi senilai Rp380 miliar yang masih belum ditatakelola dalam bentuk pembukuan yang benar.

"Di Kalbar ini irigasi dan jalan ada tetapi tidak sesuai spek dan belum dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang benar. Dan aset juga harus diperbaiki," tegas Rizal.

Masih berkaitan dengan aset, yakni masih ada aset bernilai Rp.92,2 miliar yang masih belum tuntas juga permasalahannya. Kemudian, alat dan mesin sebesar Rp2,8 miliar, disamping itu juga ada aset tanah yang belum dibukukan seluas 87.302.153,26 meter kubik senilai Rp53 miliar lebih.

"Saya meminta secara khusus kepada Sekda Kalbar dan semua jajaran SKPD yang terkait dalam penyelesaian aset ini terutama Dinas Pekerjaan Umum, BPN dan semuanya untuk segera membuat action plan memperbaiki, menatalaksanakan, membukukan, menilai dan seterusnya sehingga persoalan aset dapat selesai," jelasnya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan opini laporan keuangan Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih terkendala permasalahan aset.

"Tahun ini opini keuangan Pemprov Kalbar yang WDP jika persoalan aset itu selesai dan tidak hal-hal yang signifikan. Insyaallah saya janji tahun depan akan meraih WTP," tuturnya.

Menurut Rizal, permasalahn teknis seperti itu bukan tugasnya Gubernur Kalbar, melainkan tugas SKPD. "Saya berharap sekali lagi kepada Sekda Kalbar untuk dapat mengorganisir, mendorong dan memotivasi teman-teman SKPD untuk menyelesaikan masalah aset itu. Sekali lagi, masalahnya bukan aset tidak ada tetapi tidak dibukukan dengan standar akuntansi yang ada," tegas Rizal.

Tidak itu saja, Rizal mengungkapkan, kesalahan penganggaran pun menjadi kendala dalam pengelolaan aset Kalbar. "Tetapi, saat ini bukanlah waktunya untuk menyatakan siapa yang bersalah yang penting bagaimana memperbaikinya," jelasnya.

Kedepan, diharapkan SKPD terkait dapat menghubungi panitia anggaran dan memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang. "Jika ada yang tidak jelas dapat mengundang BPK ataupun BPKP untuk membantu, agar tidak salah lagi nomenklatur ataupun penempatan anggarannya. Mari kita perbaiki bersama," tambahnya.

Dia menambahkan, permasalahan aset itu pun tidak perlu diselesaikan dengan membentuk pansus. "Karena hanya salah pada nomenklaturnya saja," pungkasnya. **(dna)**